



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Walau era kesetaraan gender sudah semakin marak saat ini, tidak akan semudah itu untuk menghapus kuatnya pemahaman di masyarakat bahwa perempuan merupakan simbol utama penghasil keturunan yang perlu dijaga. Perempuan yang dipandang sebagai ‘produsen’ dinilai dari seberapa mereka dapat menjaga keperawanannya, wanita dinilai tidak berharga, dipandang rendah dan melanggar moral apabila mereka sudah kehilangan keperawanannya. Dari hal ini keperawanan dapat menjadi salah satu tolak ukur tingkat moralitas seorang wanita (Economica, 2020). Pada tahun 2019 terjadi seorang atlet senam perempuan terpaksa dipulangkan dikarenakan isu tidak perawan dan juga. Lalu masih ada instansi-instansi di Indonesia yang menggelar tes keperawanan dengan berlandaskan moralitas termasuk di institusi militer dan perusahaan (CNN Indonesia, 2019).

Kuatnya prinsip tersebut menimbulkan adanya kultur misoginis dan seksisme menyimpang, keduanya sama-sama didasari oleh hal yang disebut sebagai diskriminasi (Magdalene, 2020). Menurut Lamonti dan Utami (2018), diskriminasi tersebut dapat berbuah kedalam banyak pelanggaran HAM salah satunya tes keperawanan. Hal tersebut ditekankan oleh Nisha Varia dalam BBC Indonesia (2017) sebagai pembicara *woman rights* Human Rights Watch bahwa tes keperawanan juga melanggar hak asasi, merendahkan dan mendiskriminasi perempuan karena laki-laki sendiri tidak melewati tes keperawanan. Bertolak belakang dengan tulisan Binsar Gulston didalam bukunya yang berjudul “Pandangan Seorang Hakim”, perempuan harus suci dan kudus sehingga harus melewati persyaratan tegas sebelum pernikahan dengan melakukan tes keperawanan dengan salah satu alasan dapat mengurangi tingkat perceraian dilansir dari BBC Indonesia (2017). Tes keperawanan sendiri

merupakan sebuah tes ginekologis yang dipercaya bahwa dengan melakukan tes tersebut dapat mengetahui seorang wanita sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum. Tes ini dipercaya dengan melakukan pemeriksaan pada jaringan hymen yang terletak di liang vagina menggunakan dua jari (Klikdokter, 2019). Di Indonesia, pemahaman mengenai hal ini masih sangat melekat pada sebagian besar masyarakat sehingga menjadi sebuah standar yang mengatasmakan moralitas (Economica,2020).

Padahal, yang sebenarnya selaput dara atau hymen merupakan sebuah jaringan serabut yang terletak pada vagina yang memiliki fungsi untuk sebagai penyaring kotoran agar tidak langsung masuk kedalam vagina. Selaput dara setiap perempuan memiliki bentuk yang berbeda, dan ada yang terlahir dengan selaput dara, ada juga yang tidak (Halodoc, 2018). Menurut pensiunan polwan yakni Brigjen Sri Rumiati, praktik tes keperawanan tersebut tidak sesuai dengan UU No.7 tahun 1984 yang mengesahkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, di Ibu Kota praktik tersebut mulai dilarang namun beberapa kota di daerah yang jauh dari Ibu Kota ada yang masih menjalankan tes keperawanan tersebut.

Maka dari itu, Nina Dølvik Brochmann dan Ellen Støkken Dahl menekankan pada saat berbicara di TEDxOslo berjudul “The virginity fraud” 2018 lalu, bahwa keperawanan wanita tidak dapat diukur dari kondisi selaput dara seseorang, karena kondisi sudah bervariasi sehingga sulit untuk melakukan pemeriksaan keperawanan. Andreas Harsono (MataMataPolitik, 2019) mengatakan tes yang telah dilakukan oleh tenaga medis tersebut tidak mempunyai bukti klinis mengenai keperawanan perempuan, mereka hanya meminta si menempuh ujian untuk menanggalkan pakaiannya, berbaring dengan kedua kaki terbuka, lalu dokter yang kebanyakan adalah pria akan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina perempuan, Andreas juga menambahkan bahwa proses tersebut bukan soal meninggalkan rasa sakit, namun rasa trauma karena perempuan merasa terekspos di depan orang lain.

Olson dan Moreno (2017) membuktikan hal tersebut melalui penelitian mengenai ulasan sistematis tes keperawanan mereka menemukan dari 1269 studi literasi bahwa praktik tes keperawanan ini sangat minim bukti akurat dan tidak dapat menjadi pedoman yang tepat untuk membuktikan keperawanan perempuan. Tes keperawanan tersebut malah terbukti berpotensi lebih besar bagi perempuan untuk terkena serangan seksual secara fisik, psikis maupun sosial.

Apabila pemahaman masyarakat Indonesia terhadap keperawanan perempuan masih sebatas pemahaman mitos saja, terutama di Pulau Jawa dimana masih sangat patriarkis. Kelompok masyarakat daerah Jawa yang masih menganggap keperawanan merupakan masalah yang sangat sulit ditawar (Guyanie, 2010). hal tersebut akan membuat diskriminasi terhadap perempuan makin melebar dan potensi pelecehan maupun serangan seksual akan semakin tinggi. Berdasarkan analisis dan identifikasi masalah yang terjadi, penulis berencana untuk memberi pemahaman kepada masyarakat di Pulau Jawa mengenai dampak negative tes keperawanan tersebut lewat kampanye sosial. Dengan adanya kampanye ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa keperawanan hanyalah sebuah mitos sehingga kasus praktik tes keperawanan tidak lagi dilakukan di masyarakat untuk tujuan apapun.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana merancang kampanye sosial untuk memberi pemahaman bagi masyarakat di Pulau Jawa mengenai dampak negatif dari tes keperawanan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut;

### 1) Geografis

Target Utama : Pulau Jawa

Target Sekunder : Seluruh wilayah di Indonesia

### 2) Demografis

Gender : Semua gender

Usia : 15-24 tahun

Profesi : Masyarakat daerah

3) Status Ekonomi Sosial : B

Psikografis

Masyarakat atau kelompok masyarakat secara umum dengan range umur 15-24 tahun yang belum mengetahui mengenai praktik tes keperawanan dan dampak buruknya, terutama di daerah Jawa dimana seperti yang dikatakan oleh Guyanie (2010) bahwa Jawa merupakan masyarakat yang masih memegang kuat prinsip patriarki. Kelompok masyarakat daerah Jawa yang masih menganggap keperawanan merupakan sebuah tolak ukur moral seorang perempuan.

#### **1.4 Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan yang ingin dicapai yakni merancang kampanye sosial untuk memberi pemahaman bagi masyarakat di Pulau Jawa mengenai dampak negatif dari tes keperawanan.

#### **1.5 Manfaat Tugas Akhir**

Penulis berharap tugas akhir ini dapat berguna dan menjadi manfaat bagi berbagai pihak;

##### 1) Bagi Penulis

Paham dan mendapat pengalaman baru dalam menjalankan proses perancangan kampanye sosial dengan menggunakan metode penelitian yang efektif dan sesuai dengan target audiens yang dituju.

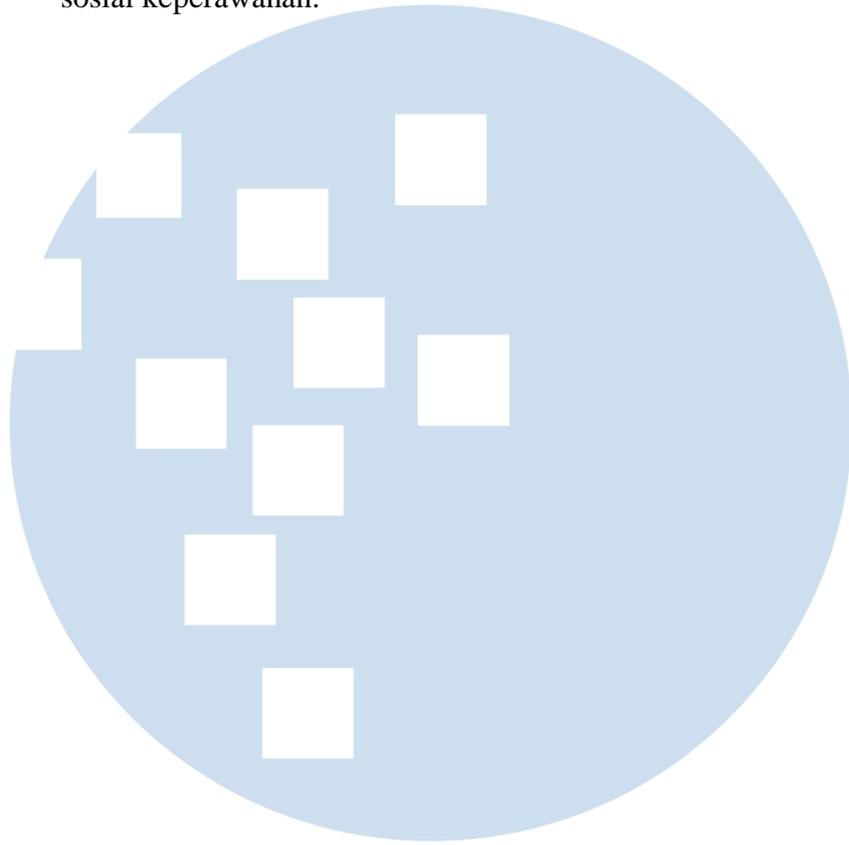
##### 2) Bagi Pembaca

Agar pembaca mendapat wawasan baru mengenai proses perancangan kampanye mitos keperawanan yang ditujukan pada masyarakat daerah.

##### 3) Bagi Universitas

Agar laporan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para mahasiswa Desain Komunikasi Visual yang ingin

menjalankan penelitian khususnya dalam perancangan kampanye isu sosial keperawanan.



# UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA